

IMPLEMENTASI PROGRAM KANGGO RIKO DI DESA KEBAHMAN KECATAN SRONO KABUPATEN BANYUWANGI

Irfan Bakhtiar

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
ibakhtiar3@gmail.com

Tjitjik Rahaju

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
tjiraha@gmail.com

Abstrak

Kemiskinan selalu menjadi salah satu masalah yang memerlukan perhatian khusus, berbagai alternatif kebijakan sudah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Guna dapat mengoptimalkan alternatif kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat maka perlu adanya inovasi dari pemerintah Daerah agar mampu mengimbangi serta mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan yang telah dijalankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Program Kanggo Riko Di Desa Kebaman Srono Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini berfokus pada Implementasi Program Kanggo Riko yang menggunakan teori implementasi milik Van Meter dan Van Horn dengan 6 indikator yaitu Standar Dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait, Disposisi, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen pelaksana maupun peserta dari Program Kanggo Riko telah memahami standar sasaran dan tujuan dari program. Sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya anggaran, sumberdaya informasi, waktu pelaksanaan dan kewenangan sudah tersedia sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan, tetapi pemanfaatan sumberdaya yang ada pada kelompok sasaran belum optimal. Karakteristik organisasi pelaksana dalam program ini cukup ideal sebagaimana keterlibatan sektor external serta internal yang menjadi penunjang suksesnya program ini. Komunikasi antar organisasi terkait serta kelompok sasaran yang terjadi didalamnya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Disposisi telah berjalan baik hal ini dapat dilihat dari Birokrasi yang terkait mendukung penuh program ini sehingga dapat tercapai tujuan program dengan maksimal. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik di Desa Kebaman cukup mendukung dan menunjang keberhasilan program. Dengan demikian saran yang dapat diberikan adalah pelaksana program pada tingkat kecamatan lebih meningkatkan pengawasan dan evaluasi jalannya program.

Kata kunci : Implementasi, Program, Kanggo Riko

Abstract

Poverty has always been one of the problems that require special attention, various alternative policies have been implemented to solve poverty problems in Indonesia. To be able to optimize alternative policies that have been implemented if the central government needs innovation from the Regional Government in order to be able to balance and optimize the poverty reduction program that has been implemented. The purpose of this study was to describe the implementation of the Kanggo Riko Program in Kebaman Srono Village, Banyuwangi Regency. This research is a qualitative research with a descriptive approach collected using observation, interview, and documentation techniques. This study focuses on the implementation of the Rico Kango Program using the implementation theory of Van Meter and Van Horn with 6 indicators, namely Policy Standards and Objectives, Resources, Characteristics of implementing organizations, Communication between related organizations, Disposition, Social, economic and political environment. The results of the study indicate that both implementing agents and participants from the Risk Kango Program have understood the standard goals and objectives of the

program. Human resources, equipment resources, budget resources, information resources, time of implementation and authority are available according to the needs needed, but the utilization of existing resources in the target group is not optimal. The characteristics of the implementing organization in this program are quite ideal as well as the involvement of the external and internal sectors that support the success of this program. Communication between related organizations and target groups that occur in it is in accordance with the main tasks and functions of each. The disposition has gone well, this can be seen from the related bureaucracy that fully supports this program so that program objectives can be achieved maximally. The social, economic and political environment in Kebaman Village is sufficient to support and support the success of the program. Thus the advice that can be given is that program implementers at the sub-district level further improve the supervision and evaluation of the program.

Keywords: Implementation, Program, Kanggo Riko.

PENDAHULUAN

Kemiskinan selalu menjadi permasalahan yang rumit pada tiap negara dan memerlukan perhatian yang khusus. Berbagai alternatif kebijakan sudah diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan di Indonesia, kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Sasmito, 2019). Dalam rangka percepatan serta menanggulangi permasalahan kemiskinan yang ada di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah daerah mencanangkan kebijakan Program Kanggo Riko (PKR) untuk mengurangi dan bertujuan memutus rantai kemiskinan bagi Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menjadi kelompok sasaran program PKR. Melalui PKR pemerintah berupaya secara maksimal dalam menanggulangi kemiskinan melalui pemberian bantuan modal usaha.

Sebagai upaya dalam rangka mendukung pemerintah pusat dalam menanggulangi masalah kemiskinan serta bentuk kepedulian kepada masyarakat khususnya masyarakat yang kurang mampu, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 tentang Program Kanggo Riko yang didalamnya mengatur mengenai bantuan modal usaha kepada masyarakat miskin yang oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi disebut sebagai Program Kanggo Riko (PKR). PKR adalah program bantuan modal usaha yang dikhususkan bagi penduduk Kabupaten Banyuwangi dari keluarga miskin dan rentan miskin. Secara umum tujuan PKR adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan percepatan penanggulangan masalah kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi, dengan memberikan bantuan kepada warga miskin yang masih produktif untuk melakukan kegiatan usaha. (www.jdih.kab.banyuwangi.go.id)

Secara khusus PKR bertujuan sebagai berikut :

1. Memberikan akses interaksi dan perlindungan terhadap RTM pada kegiatan usaha produktif.
2. Memperluas akses RTM terhadap usaha produktif guna meningkatkan kesejahteraan serta peningkatan asset usaha RTM.
3. Membantu mendorong upaya ketahanan sosial ekonomi rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.
4. Mendorong motivasi untuk berusaha dan meningkatkan (life skill) RTM dalam meningkatkan kesejahteraan.

(Tim Pelaksana Kegiatan Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi, 2018).

Adapun sasaran dari PKR adalah penduduk miskin dan rentan miskin produktif yang berasal dari data PBDT 2015 dan tidak menjadi peserta Jalinmatra baik BRTSM, PFK, ataupun PK2, dan program bantuan lainnya. Landasan hukum yang mendasari PKR adalah Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2018 tentang Program Kanggo Riko, sedangkan pelaksanaan PKR ini berpedoman pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kanggo Riko Kabupaten Banyuwangi tahun 2018. Pelaksana PKR adalah tim sekretariat kabupaten yang meliputi pemerintah kabupaten beserta instansi di tingkat kecamatan dan tim sekretariat desa yang meliputi pemerintah tingkat desa beserta kader pemberdayaan masyarakat desa. (www.jdih.kab.banyuwangi.go.id)

Berdasarkan permasalahan dalam implementasi maka penelitian ini sesuai dengan model pendekatan implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2012) yang mengatakan ada enam variabel atau faktor yang paling berpengaruh atau krusial dalam implementasi kebijakan publik, pertama adalah standar dan sasaran kebijakan sebagai dasar penilaian atas tingkat ketercapaian atau keberhasilan suatu kebijakan. Kedua adalah sumber daya, seperti sumber daya manusia, informasi, keuangan, waktu pelaksanaan dan peralatan. Ketiga adalah karakteristik organisasi pelaksana yang mana berwujud dari organisasi yang terlibat dalam implementasi program. Keempat adalah Komunikasi antara organisasi terkait. Kelima adalah disposisi. Keenam adalah Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Permasalahan yang meliputi ketidaksesuaian peserta yang menerima Program Kanggo Riko, akan terjawab jika dianalisis menggunakan teori milik Van Meter dan Van Horn tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti memilih judul jurnal "Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi.

METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitiannya menggunakan teori implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar sasaran, sumberdaya, karakteristik organisasi,

komunikasi, disposisi (sikap pelaksana) dan lingkungan sosial, politik, ekonomi dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebahman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2014) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebahman Srono Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh model Van Mater dan Van Horn (dalam Agustino 2012) yang mengatakan terdapat enam variabel atau faktor yang paling krusial dalam implementasi kebijakan publik, pertama adalah standar dan sasaran kebijakan, kedua adalah sumberdaya, ketiga adalah karakteristik organisasi, keempat komunikasi, kelima disposisi (sikap pelaksana) dan yang keenam adalah lingkungan sosial, politik, ekonomi adapun penjabarannya sebagai berikut ini:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis. Pemahaman mengenai sasaran tertentu yang harus dicapai oleh agen pelaksana merupakan landasan yang mendasar, dengan adanya sasaran tertentu yang bersifat realistis maka akan dapat diukur keberhasilan dari pencapaian yang telah dilakukan oleh agen pelaksanaan program, namun ketika ukuran terlalu ideal maka akan sangat sulit suatu kebijakan untuk dilaksanakan. Dalam PKR sebagai mana yang telah disampikan oleh Bapak Bambang Setiadi selaku salah satu anggota TPK Kesekretariatan Desa;

“ Program Kanggo Riko merupakan suatu wadah bagi rumah tangga miskin untuk mensejahterakan diri. Kami selaku aparatur desa hanya membantu menyalurkannya saja dan sejauh ini prgamnya sudah bisa dikatakan sukses sebab bantuan yang diberikan telah dapat dikelola oleh penerima bantuan”. (*Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober pukul 13.00 wib*).

2. Sumberdaya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas

sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan dengan adanya ketersediaan ketiga sumberdaya tersebut serta pemanfaatan yang maksimal baik dari agen pelaksana maupun kelompok sasaran kebijakan sehingga standar dan sasaran atau tujuan kebijakan dapat dicapai.

Wawancara dengan Pendamping Program Kanggo Riko Bapak Erwin Futaqila., menyatakan :

" PKR ini kalau tidak ada dananya tidak mungkin jalan mas, meski ada orangnya kalo tidak ada duitnya bukan bantuan modal usaha namanya tapi pelatihan usaha, dengan apa yang ada saat ini tidak semua kegiatan usaha jalan mas apa lagi kalo tidak ada sama sekali”(wawancara pada hari senin 22 Oktober 2018 pukul 15.00 WIB di Kantor Balai Desa).

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksana. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Wawancara dengan, Bapak Alif Burhannudin selaku Sekretariat Desa., menyatakan :

" Pendamping Program Kanggo Riko dimabil dari kader pemberdaya masyarakat desa(KPMD), kalau Tim pelaksana kegiatan(TPK) diambil dari kecamatan mas ".(*wawancara pada hari Kamis 20 Desember 2018 pukul 13.00 WIB di Kantor Balai Desa*).

Keberhasilan suatu program terutama implementasinya sangatlah berpengaruh pada personil pelaksana dari instansi terkait. Personil instansi terkait haruslah kooperatif hal tersebut sehubungan dengan yang dinyatakan oleh Bapak Santoso selaku peserta Program yang menyatakan;

“Ya pihak desa cukup kooperatif ko Mas, saat ada warga yang kurang mengerti apa itu PKR ato cara mengurus PKR kami diberikan arahan oleh pelaksana kegiatan yang ada di Balai Desa ”.(*Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober pukul 11.00 wib*).

4. Komunikasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para agen pelaksana maupun individu yang menjadi sasaran program. Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu

standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan.

Permasalahan lain yang berasal dari masyarakat berkaitan dengan hal itu Bapak Alif Burhannudin selaku Sekretaris Desa., menyatakan:

“ Kalau komunikasi dari desa ke kecamatan sudah bisa dikatakan sinergi, namun yang lebih mengerti kondisi wargakan ya masing masing kasun yang ada jadi berdasarkan data saja saya rasa kurang valid”. (*wawancara pada hari kamis 20 Desember 2018 pukul 13.00 WIB di Kantor Balai Desa*).

Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

5. Disposisi (Sikap Agen Pelaksana)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan, hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang benar benar memahami permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan - kepentingan organisasinya dan kepentingan - kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn (Agustino, 2012).

Wawancara dengan anggota Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kesekretariatan Desa Program Kanggo Riko, Bapak Bambang Setiadi., menyatakan :

“Kalau permasalahan yang sering terjadi di desa kebaman itu banyak orang yang bukan merupakan sasaran namun mengajukan diri untuk diikutsertakan

dalam program, entah itu mampu atau tidak mampu”. (*Wawancara dilakukan pada tanggal 22 Oktober pukul 11.00 wib*).

6. Lingkungan Sosial, Ekonmi dan Politik

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Wawancara dengan, Bapak Alif Burhannudin selaku Sekretaris Desa., menyatakan :

" Keterlibatan masyarakat, dan pegawai kecamatan saya rasa juga berperan dalam keberlanjutan program ini, tidak hanya itu saja mas, saya dapat rasakan juga antusias dari sektor usaha mikro dan menengah seperti koprasi dan kelompo usaha lainnya karena dengan adanya program ini ada imbas langsung yang dapat dirasakan pada kegiatan usaha mereka ".(*wawancara pada hari kamis 20 Desember 2018 pukul 13.00 WIB di Kantor Balai Desa*).

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan Lingkungan eksternal memiliki pengaruh terhadap kesuksesan penerapan kebijakan publik, sikap penerimaan serta penolakan dari suatu kebijakan akan berdampak pada berjalanya implementasi.

Pembahasan

Kebijakan publik dibuat oleh lembaga atau institusi yang berwenang (*authorities*) setelah sebelumnya mereka menerima masukan/input dari masyarakat/ lingkungan (David Easton, 2011: 12), kemudian Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan (Soetomo, 2007: 42) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena hal itu dengan memperhatikan permasalahan kesehatan yang selalu menjadi permasalahan yang pemerintah sebagai lembaga yang berwenang telah berbuat banyak untuk menjamin kesehatan masyarakat yang kurang mampu yang akan berpotensi pada meningkatnya angka kemiskinan melalui kebijakan tersebut. Kebijakan bantuan kesehatan tentunya selalu belajar dari masukan-masukan yang terjadi di masyarakat meskipun begitu demi mencapai sebuah tujuan yang umumnya mensejahterakan masyarakat

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012) ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan antara lain :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Satuan ukuran dan tujuan dari Implementasi kebijakan PKR guna dapat mengukur keberhasilan Implementasi PKR ialah pemberdayaan rumah tangga sangat miskin RTSM yang masih produktif untuk dapat meningkatkan kesejahteraan RTSM secara mandiri. Tujuan dari kebijakan PKR dapat dikatakan menanggulangi permasalahan yang ada pada tingkat desa serta lebih jauh lagi, dalam jangka panjang tujuan dari kebijakan PKR memiliki maksud untuk mencegah terjadinya perangkap kemiskinan.

2. Sumberdaya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, sama halnya dengan implementasi PKR guna dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada maka diperlukan manusia yang kompeten pemanfaatan dana dari Program Kanggo Riko dari segi SDM, biaya, perencanaan, dan waktu sudah dapat dikatakan cukup bagus, sebagaimana perkembangan dari usaha yang dikelola oleh sasaran kebijakan. Pada dasarnya semua kegiatan usaha yang dijalani memiliki prospek atau hasil yang dapat meningkatkan kesejahteraan dari sasaran kebijakan sebagai mana tujuan dari program yaitu menanggulangi masalah kemiskinan dan mencegah terjadinya perangkap kemiskinan. Berdasarkan dari apa yang ada dilapangan dapat dikatakan bahwasanya usaha yang dikelola oleh sasaran kebijakan ada beberapa usaha yang kurang berjalan dengan baik, hal ini terjadi karena kurangnya keahlian atau skill dari peserta program dalam berinovasi dalam menciptakan usaha dan juga segi pengelolaan usaha yang kurang optimal sehingga dampak dari program kurang maksimal.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, pelaksanaan Implementasi Program Kanggo Riko Karakteristik organisasi pelaksana peranan dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Srono dan Desa Kebaman sebagai Organisasi Formal sudah cukup bagus, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan program yang melibatkan lini atas hingga lini bawah yang berkaitan dengan Program Kanggo Riko. Sebagai ujung tombak dari kebijakan Publik sasaran program yang tidak lain adalah masyarakat dan agen pelaksana program dari lini yang paling bawah adalah pemerintah pada tingkat desa komunikasi dari kedua pihak terjalin cukup baik sehingga kondisi sasaran kebijakan dapat serta perkembangannya dapat dipantau secara detail oleh pelaksana kegiatan. Ketersediaan barang dan jasa juga sudah ter cukupi oleh Organisasi Informal, keharmonisan antara ketiga elemen tersebut sangat mendukung keberhasilan serta jalannya Program Kanggo Riko.

4. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu syarat penting dalam mewujudkan atau mengimplementasikan suatu kebijakan, guna memberikan gambaran, hakiikat,

dan tujuan dasar tentang kebijakan publik komunikasi dari setiap unsur elemen serta lembaga terkait akan mendukung keberhasilan dalam melaksanakan atau mengimplementasikan suatu kebijakan. Berdasarkan penelitian dilapangan, komunikasi antara instansi terkait dalam pelaksanaan Implementasi Program Kanggo Riko dapat dikatakan komunikasi antar Organisasi terkait yang meliputi Pemerintah Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemerintah kecamatan dan Pemerintah di tingkat Desa serta segenap elemen masyarakat telah terjalin hubungan yang cukup baik sehingga dalam mengimplementasikan Program Kanggo Riko, sebagai salah satu contoh yang ideal instruksi atau gambaran mengenai Program Kanggo Riko dari pemerintah kabupaten ke pemerintah kecamatan dan seterusnya sesuai dengan penetapan dari pemerintah pusat.

5. Disposisi (Sikap Agen Pelaksana)

Didalam pelaksanaan Kebijakan Publik tidak akan pernah lepas dari permasalahan yang meliputi proses Implementasinya, sebagai mana yang terjadi dalam Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebaman. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, Disposisi atau Sikap pelaksana sangatlah memberikan dampak terhadap kesuksesan Implementasi Kebijakan Publik, sehubungan dengan Implementasi Program Kanggo Riko agen-agen pelaksana sudah melakukan peranya dengan sangat bagus. Hal ini dapat dilihat dari pemahaman tentang hakikat, tujuan, dan pandangan mengenai Program Kanggo Riko, dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul, agen pelaksana atau implementor solusi-solusi yang diberikan dapat diterima oleh sasaran kebijakan maupun masyarakat umum sehingga proses Implementasi Program Kanggo Riko dapat berjalan sebagaimana yang seharusnya.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, pelaksanaan Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dari segi lingkungan eksternal yang meliputi kondisi sosial, ekonomi, dan politik, kondisi lingkungan di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dapat mendukung keterlaksanaan Implementasi Program Kanggo Riko, kondisi lingkungan eksternal di Desa Kebaman kondisinya cukup kondusif. Sebagai mana kesinambungan dari variabel-variabel sebelumnya yang dapat mendukung untuk menjadi gambaran kondisi yang ada di Desa Kebaman berkenaan dengan kondisi lingkungan eksternal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dapat disimpulkan bahwa secara teknis pelaksanaannya telah berhasil. Keberhasilan

dalam mengimplementasikan Program Kanggo Riko dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan dari peserta program dan adanya perkembangan dari kegiatan usaha yang dikelola oleh peserta program serta adanya keterlanjutan dari program yang berwujudkan pengawasan, pendampingan dan evaluasi kegiatan. Meskipun sebagian besar dari peserta program kurang memahami mengenai hakikat dari Program Kanggo Riko, dari segi teknis maupun tujuan program telah dapat terlaksana yaitu terjadinya peningkatan kesejahteraan dari masyarakat miskin melalui kegiatan usaha yang dikelola secara mandiri. Secara garis besar penyebab dari permasalahan yang terjadi pada proses Implementasi Program Kanggo Riko disebabkan oleh kurangnya pemahaman kelompok sasaran sendiri sehingga penerapan program menjadi kurang tepat sasaran.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, secara keseluruhan Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebaman Kecamatan Srono sudah berjalan dengan baik, sehingga di sini peneliti menyarankan agar Desa Kebaman Kecamatan Srono mempertahankan apa yang sudah dilaksanakan. Adapun saran-saran yaitu: Guna memaksimalkan pelaksanaan Implementasi Program Kanggo Riko di Desa Kebaman maka dalam proses pengawasan dan evaluasi yang dilakukan pada tingkat kecamatan agar lebih ditingkatkan dalam memantau jalannya program.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

- a. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
- b. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing
- c. Indah Prabawati S.Sos., M.Si. dan M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. selaku dosen penguji.
- d. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
- e. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabetha.

Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mufidah, Shabrina. 2018. *Implementasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri Dan Sejahtera (Jalin Matra) Dalam Penanggulangan Kerentanan Kemiskinan (Pk2) Di Desa Domas Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik*. Skripsi

Nawawi, Hadari. 2003. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Soeharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik : Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta.

Soenarko. 2005. *Public Policy: Pengertian Pokok untuk Memahami dan Analisa Kebijaksanaan Pemerintah*. Surabaya : Airlangga University Press.

Soetomo. 2007. *Teori-Teori Sosial dan Kebijakan Publik*. Jakarta: Prenama Media Group.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif & RND*. Bandung : Alfabetha.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Program Kanggo Riko, 2018. *Pedoman Umum Pelaksanaan Program Kanggo Riko*. Banyuwangi. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Banyuwangi.

Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Widodo, Joko. 2007. *Analisis Konsep dan Aplikasi : Analisis Proses*. Malang: Banya Media Publishing.

JURNAL

Sasmito, Cahyo. 2019. *Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu*. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4847/2675>, diakses pada tanggal 13 Mei 2019

Krishnan, Annand dkk. 2014. "No one says 'No' to money" – a mixed methods approach for evaluating conditional cash transfer schemes to improve girl children's status in Haryana, India. *Jurnal Online*. <http://e-resources.perpusnas.go.id/library.php?id=00001>, diakses pada tanggal 19 September 2018.

WEBSITE

www.jdih.kab.banyuwangi.go.id, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018.